

Public Service

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BONE

Our company



# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Tahun 2021 dapat terselesaikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan tahun 2021.

LKjIP DPMPTSP Kabupaten Bone Tahun 2021 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun ketiga dalam masa pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) 2018-2023. LKjIP Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) 2021 sebagai penjabaran dari RENSTRA 2018-2023. Laporan ini memuat aspek perencanaan, perjanjian kinerja, dan akuntabilitas yang memberikan gambaran capaian kinerja, analisa serta rencana tindak lanjut terhadap capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kab. Bone

Dengan terselesaikannya LKjIP ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, efektif dan efisien seta berkelanjutan di masa mendatang.

Watampone, 28 Februari 2022

ttd,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bone



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. UMUM .....	1
B. ORGANISASI .....	3
C. ISU STRATEGIS .....	8
D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI .....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
A. TUJUAN DAN SASARAN.....	11
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	13
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	15
D. PERJANJIAN KINERJA .....	15
E. STANDAR PENILAIAN KINERJA .....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	18
A. CAPAIAN KINERJA .....	18
B. REALISASI ANGGARAN .....	42
BAB IV PENUTUP.....	43

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Umum**

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diubah dengan Undang Undang no 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Pemerintah daerah dan Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat maka misi utama dari kedua undang- undang tersebut bukan hanya untuk melimpahkan kewenangan dan Pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tetapi yang lebih penting adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan manajemen keuangan guna lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan

akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKj Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKj Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan

di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

## B. Organisasi

Dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berkaitan dengan Investasi Pemerintah Kabupaten Bone melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Bone yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 4), Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.

Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bone sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana disebutkan diatas adalah sebagai berikut :

**Tugas pokok** : membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan daerah bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Fungsi :**

- Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
- Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, perisiann dan non perizinan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
- Pelaksanaan administrsi dinas urusan pemerintahan bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berkenaan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perizinan yang dilayani terlampir dalam QR Code berikut :



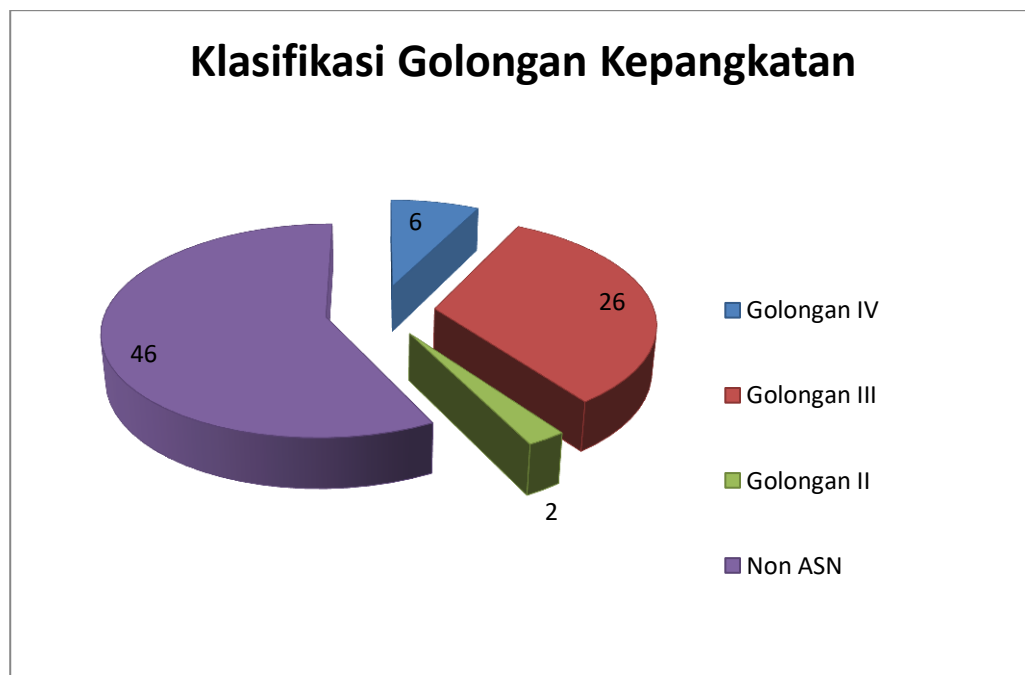
Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Bone tahun 2016, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6), yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone. Kemudian terjadi penyederhanaan birokrasi melalui pelantikan seluruh pejabat struktural eselon IV menjadi pejabat fungsional yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.

Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone sesuai Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2021 sebagaimana disebutkan diatas dapat diakses melalui QR Code berikut :



Susunan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam menjalankan roda organisasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan perlengkapan yang dimiliki sebagai elemen penting dan berpengaruh dalam mencapai tujuan organisasi. Susunan kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan, dan eselon.

- a. Berdasarkan **golongan kepangkatan**, pegawai ASN dan non ASN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dapat dikelompokkan menjadi :



- b. Berdasarkan **tingkat pendidikan**, pegawai ASN dan non ASN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dapat dikelompokkan menjadi :

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	ASN	NON ASN	JUMLAH
1	Pasca Sarjana	8	5	13
2	Sarjana	23	29	52
3	Diploma 3 (D3)	2	-	2
4	SMA	1	12	13
<b>TOTAL</b>		<b>34</b>	<b>46</b>	<b>80</b>

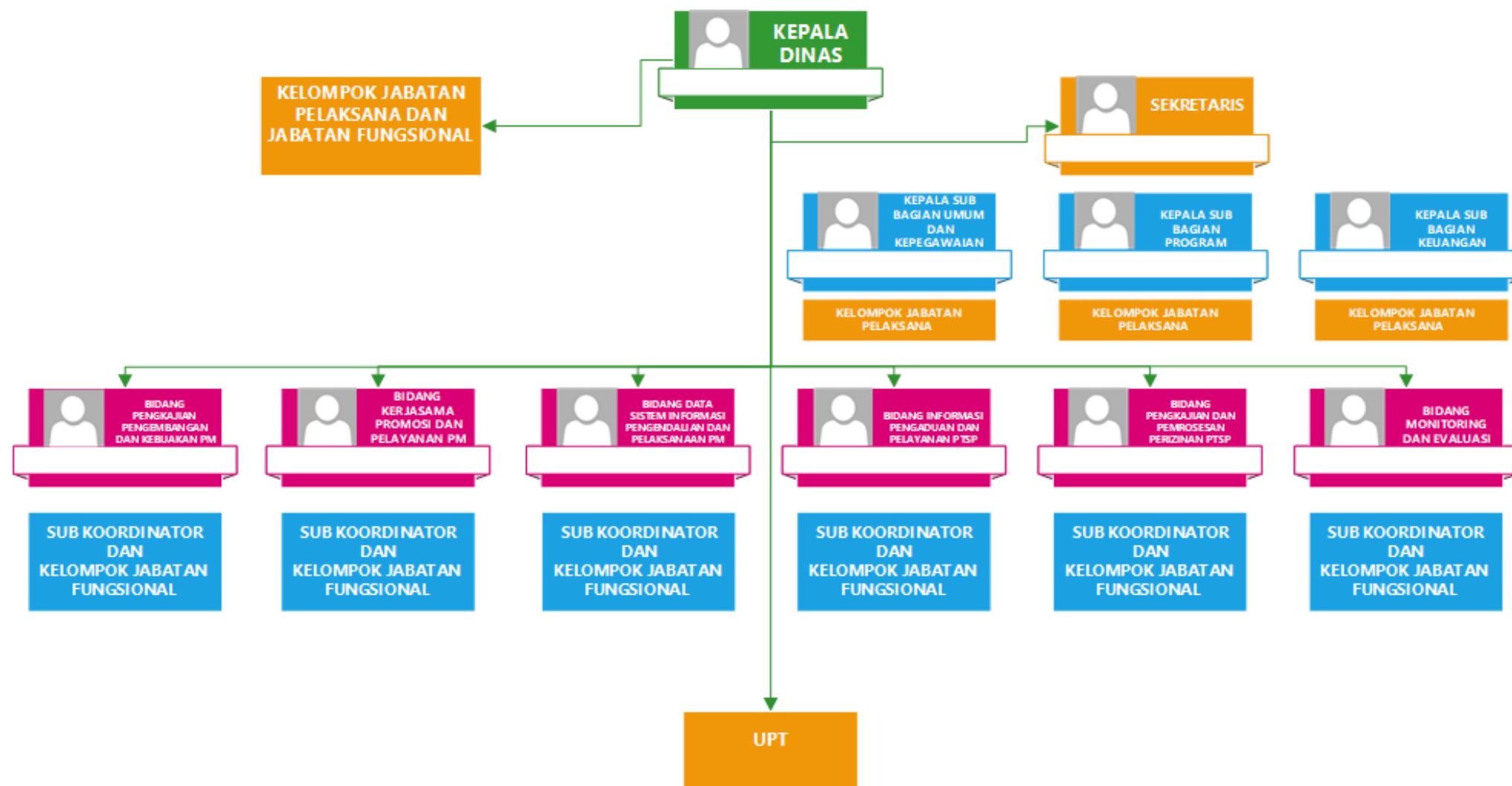


- c. Berdasarkan **eselon**, ASN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dapat dikelompokkan menjadi :





## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



### C. Isu Strategis

Meningkatkan tata kelola pemerintahan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku insititusi pelayanan publik yang dilakukan secara bertahap, terkait akuntabilitas dan manajemen kinerja, pengelolaan sumber daya manusia, praktek professional, dukungan anggaran, sarana dan prasarana. Meningkatkan kemudahan proses pelayanan perizinan, melaksanakan pengawasan pelaksanaan perizinan, dan mendorong terwujudnya iklim investasi penanaman modal yang kondusif dan berdaya saing.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone guna pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi sebagai bagian dari Rencana Strategis Pencapaian Visi Misi Bupati Bone periode tahun 2018-2023, yaitu untuk mewujudkan Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera, banyak dipengaruhi oleh aspek-aspek strategis berupa kekuatan dan kelemahan secara internal dan eksternal serta tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi oleh organisasi.

Kekuatan dan kelemahan organisasi berdasarkan aspek strategis yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone, terdiri dari :

#### 1. Faktor Internal

Kekuatan organisasi secara internal, yaitu :

- a. Tersedianya regulasi untuk melaksanakan kewenangan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- b. Adanya dukungan/komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat / pemohon izin
- c. Tersedianya Sistem Informasi dan Manajemen Perizinan secara Elektronik (SIMPEL) untuk mendukung proses perizinan dan non perizinan

Kelemahan organisasi secara eksternal, yaitu :

- a. Kuantitas/kompetensi aparatur dalam penanganan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu belum optimal dan belum memadai;
- b. Prasarana gedung kantor yang kurang memadai;
- c. Koordinasi antar bidang belum opimal;
- d. Keterbatasan anggaran;
- e. Belum berlakunya secara efektif sistem *reward* dan *punishment*

#### 2. Faktor Eksternal

##### a. Peluang

- 1) Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi;



- 2) Adanya dukungan dari Pemangku Kepentingan (stakeholder).
  - 3) Tuntutan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu secara cepat dan memuaskan masyarakat
- b. Ancaman
- 1) Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;
  - 2) Kebutuhan penanam modal akan informasi yang diperlukan untuk melakukan investasi belum terpenuhi;
  - 3) Pemahaman penanam modal terhadap ketentuan di bidang Penanaman Modal dan Perizinan masih rendah;
  - 4) Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah.
- c. Tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone dalam pelaksanaan tupoksi organisasi, yaitu sebagai berikut :
- 1) Belum tersedianya Database Investasi dan Regulasi Insentif Penanaman Modal;
  - 2) Ketepatan jangka waktu penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan belum sesuai SOP;
  - 3) Masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Pelayanan Perizinan dan Penanaman modal;
  - 4) Masih kurangnya dukungan kebijakan/regulasi terhadap kegiatan promosi guna mendorong peningkatan iklim investasi di Kab. Bone;
  - 5) Masih rendahnya kegiatan pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan pengembangan Investasi dan Penanaman Modal;
  - 6) Belum terwujudnya kerjasama yang sinergis antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, dunia usaha maupun *stakeholder* terkait lainnya dalam pengembangan investasi dan penanaman modal;
  - 7) Secara kuantitas maupun kualitas kerjasama dalam pengembangan investasi dan penanaman modal masih belum sesuai harapan;
  - 8) Terbatasnya kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia untuk Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
  - 9) Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan surat izin baik berupa surat Izin Mendirikan Bangunan maupun surat izin lainnya yang wajib dimiliki;
  - 10) Masih adanya masyarakat yang memakai jasa calo untuk penerbitan surat izin khususnya Izin Mendirikan Bangunan;



#### **D. Aspek Strategis Organisasi**

Demi meningkatkan kinerja pelayanan publik sebagai kunci pencapaian reformasi birokrasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone mengembangkan berbagai inovasi di bidang pelayanan. Jemput Antar Izin Penelitian dan Izin Praktik (JEMARI PERAK) telah diluncurkan pada pertengahan tahun 2021. Program penjemputan izin ini memfasilitasi tiga kecamatan yang ada di kota, yakni Tanete Riattang, Tanete Riattang Timur, dan Tanete Riattang Barat. Program ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam proses pengurusan izin, mengirit waktu dan biaya dalam proses pengurusan perizinan demi mengoptimalkan peran pelayanan perizinan dengan metode jemput antar.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone juga berencana membangun Mal Pelayanan Publik. Mal Pelayanan Publik sebagai tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara /Badan usaha Milik Daerah dan Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman. Proses perencanaan pembangunan Mal Pelayanan Publik telah dimulai sejak awal tahun 2021, dimulai dari pembentukan tim hingga audiensi ke berbagai instansi yang telah menyatakan kesediaan untuk bergabung.

Sesuai dengan Permen PAN & RB No.23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Mal Pelayanan Publik diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sedangkan proses pembangunan Mal Pelayanan Publik ditanggungjawabkan kepada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang. Rencana pembangunan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bone akan dimulai pada awal Tahun 2022.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Tujuan dan Sasaran

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Tahun 2021-2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Bone 2018-2023. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD selama 5 tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

**Visi Pembangunan Kabupaten Bone 2018 – 2023** adalah:

**“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”**

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni “Masyarakat Bone yang Mandiri”, “Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”, dan “Masyarakat Bone yang Sejahtera”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
2. **Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.
3. **Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang baik.

### **Misi Pembangunan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023**

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Dengan mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, prioritas pembangunan disasar oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone adalah pada misi :

1. Misi Kesatu, yakni: Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Misi Kelima, yakni: Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik

### **Tujuan dan Indikator Kinerja**

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone memiliki Tujuan :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan DPMPPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone memiliki indikator tujuan yaitu :

1. Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat



Tabel 2.1  
Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra 2018 – 2023

NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun ke -				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	C	B	BB	BB	A
2		Meningkatkan Nilai Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Presentase Peningkatan Investasi (persen)	-	12	15	18	21
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan DPMPPTSP		Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	A	A	A
4		Meningkatnya Daya Tarik Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Nilai PMA/PMDN (Milyar)	150	175	300	350	400

Sumber Data : Dokumen Renstra DPMPPTSP 2018 – 2023 dan RENSTRA Perubahan DPMPPTSP 2021- 2023

Dengan melihat hasil predikat evaluasi SAKIP Tahun 2018-2023 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi dan Tim Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, maka kami diharapkan untuk memperbaiki dokumen akuntabilitas yang menjadi bahan pengukuran Nilai SAKIP. Yang selanjutnya kami laporkan dalam penyusunan dokumen ini.

B. Strategi dan Arah Kebijakan

1. Strategi

**Strategi** adalah suatu rencana untuk mencapai tujuan tertentu yang disusun sedemikian rupa oleh suatu organisasi sesuai dengan misi yang hendak diraihnya sekaligus untuk melaksanakan mandat/tugas-tugas yang diembannya dengan mempertimbangkan pengaruh faktor-faktor lingkungan eksternal maupun internal.

2. Arah Kebijakan

**Arah kebijakan** merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan





Gambar 2.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu





C. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan/sasaran dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Indikator Kinerja Utama Perubahan Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati No 101 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Thun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone.

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan DPMPTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	A	A	A
2	Meningkatnya Daya Tarik Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Nilai PMA/PMDN (Milyar)	150	175	300	350	400

Sumber Data : Perbup IKU No. 101 Tahun 2021

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Perjanjian Kinerja ini berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan dan bahan evaluasi akuntabilitas pencapaian kinerja tahunan oleh Bupati Bone terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone dalam rangka pencapaian Visi Dan Misi Pemerintah Kab. Bone.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran dalam satu tahun anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2021 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Bone dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021, dan APBD Tahun Anggaran 2021.

Sebagai wujud komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone dalam pencapaian target kinerja tahunan yang telah tercantum dalam Renja/RKT Tahun 2021, maka telah ditetapkan Perjanjian



Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani bersama oleh Inspektur Daerah dengan Bapak Bupati Bone. (tersaji pada QR Code)

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kab. Bone Tahun 2021

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan DPMPTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 5.556.283.823
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 693.660.200
Meningkatnya Daya Tarik Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Nilai PMA/PMDN (Milyar)	300 Milyar	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 35.240.000
			Program Promosi Penanaman Modal	Rp 169.662.000
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 259.337.500
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 2.095.000
Jumlah				Rp 6.716.278.523





E. Standar Penilaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Angka maksimum capaian setiap indikator kinerja ditetapkan sebesar 100%.  
Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0;
2. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah:

**Capaian Indikator Kinerja** =  $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

3. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran;
4. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.4  
Standar Penilaian Kinerja

Nilai %	Pencapaian
>110 %	Sangat tercapai / Sangat berhasil
90 % ≤ x < 110%	Tercapai / Berhasil
60 % ≤ x < 90 %	Cukup Tercapai / Cukup berhasil
x < 60 %	Tidak tercapai / Tidak berhasil





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone Tahun 2021 diukur berdasarkan capaian kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone pada tahun 2021. Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan hasil pengukuran kinerja terhadap target capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja dari sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 - 2023.

Capaian indikator kinerja tujuan/sasaran atas perjanjian kinerja diatas mengacu pada tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi :

TUJUAN 1	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan	
INDIKATOR : Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	
SASARAN	INDIKATOR
Meningkatnya Kualitas Pelayanan DPMPPTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat

TUJUAN 2	
Meningkatkan Nilai Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	
INDIKATOR : Presentase Peningkatan Investasi	
SASARAN	INDIKATOR
Meningkatnya Daya Tarik Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Nilai PMA/PMDN (Milyar)

Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan / sasaran strategis tersebut diatas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2021 sebagai berikut :

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Capaian kinerja tahun anggaran 2021 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan



membandingkan target kinerja dan realisasi pada Tahun 2021 sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

NO	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Ket.
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	B	BB	125%	Melampaui target
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan DPMPPTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	A	B	67%	Belum Mencapai target
2	Meningkatkan Nilai Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Presentase Peningkatan Investasi (persen)	15	57	380%	Melampaui Target
	Meningkatnya Daya Tarik Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Nilai PMA/PMDN (Milyar)	300.000.000.000	278.269.682.501	93%	Belum Mencapai Target
Rata – Rata					236%	Sangat Tercapai / Sangat Berhasil

**Sumber Data : Evaluasi RENJA DPMPPTSP Tahun 2021**

Berdasarkan tabel diatas, rata – rata capaian kinerja 1666% dengan kategori pencapaian Sangat Tercapai / Sangat Berhasil.

**2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018 – 2023**

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018 – 2023. Adapun realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut :



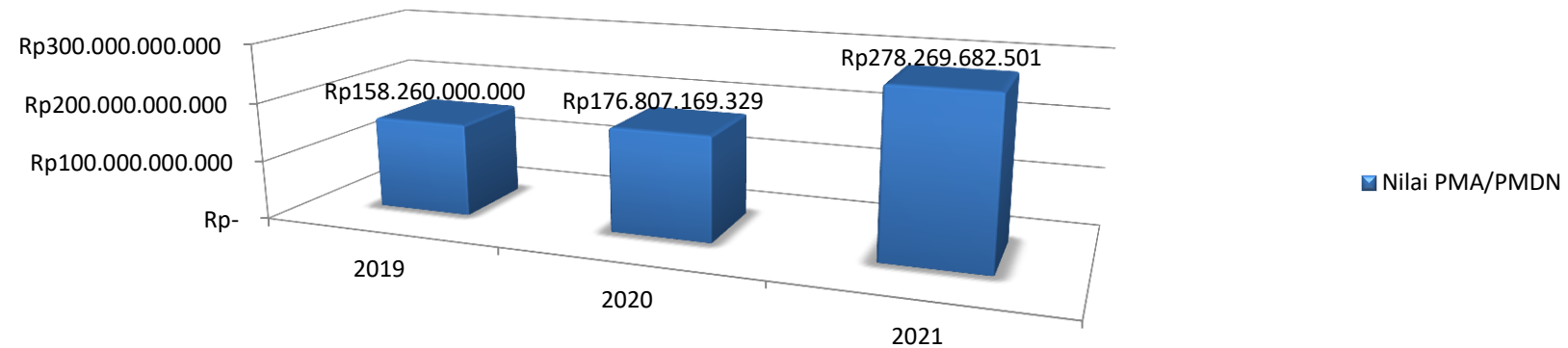
**Tabel 3.2**  
**Realisasi Kinerja Tahun 2018 – 2023**

NO	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal 2018	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP		B	BB				100%	125%			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan DPMPTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat		B 79	B 81	B 83,49			67%	67%	67%		
2	Meningkatkan Nilai Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Presentase Peningkatan Investasi (persen)				57%					380%		
	Meningkatnya Daya Tarik Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Nilai PMA/PMDN (Milyar)		158.260. 000.000	176.807.169.329	278.269.682.501			106%	101%	93%		

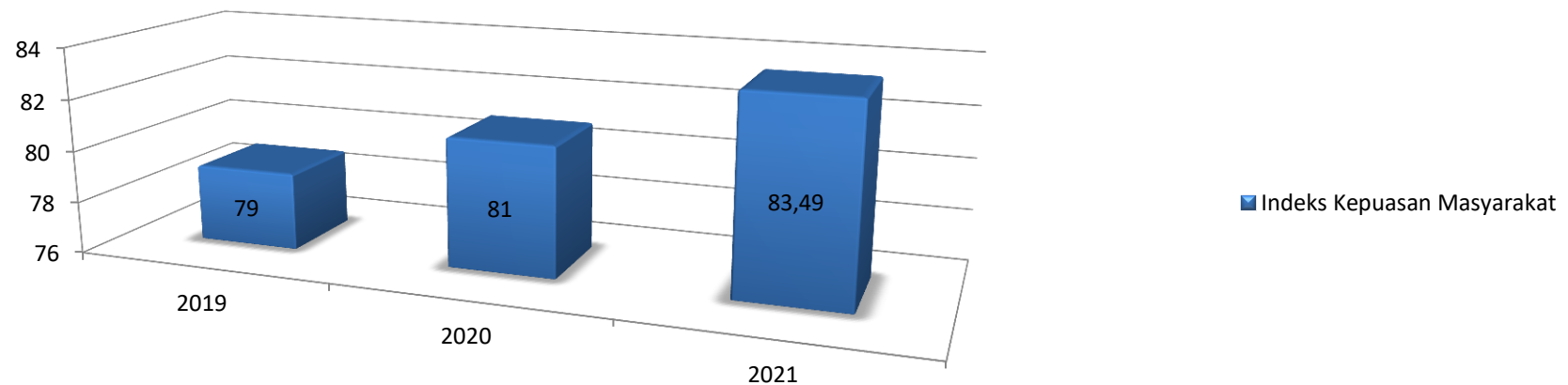
**Sumber data : LHE SAKIP ITDA Kab. Bone Tahun 2021, SKM DPMPTSP 2021, Rekapitulasi Investasi Penanaman Modal 2021**



### Nilai PMA/PMDN



### Indeks Kepuasan Masyarakat





Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa perbandingan capaian kinerja Tahun 2019 – 2021 adalah sebagai berikut :

#### **Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP**

Capaian Kinerja Tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan dengan capaian Tahun 2019 sebesar 100% dan Tahun 2020 sebesar 125%.

#### **Indeks Kepuasan Masyarakat**

Capaian kinerja Tahun 2019 – 2021 apabila dilihat dari presentase capaian tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan akan tetapi apabila dilihat dari skor realisasi kinerja mengalami peningkatan yaitu pada Tahun 2019 dengan skor 79, 2020 skor 81 dan 2021 skor 83,49.

#### **Presentase Peningkatan Investasi**

Capaian pada Tahun 2019 - 2020 masih kosong karena indikator ini merupakan indikator baru yang disajikan dalam dokumen Renstra Perubahan, sementara untuk Tahun 2021 capaian indikator sebesar 380% dengan realisasi kinerja sebesar 57% dari target 15%.

#### **Nilai PMA/PMDN (Milyar)**

Capaian kinerja tahun 2019 – 2021 mengalami penurunan yaitu tahun 2019 sebesar 106%, tahun 2020 sebesar 101% dan tahun 2021 sebesar 93% akan tetapi bila dilihat dari kolom realisasi kinerja Nilai investasi dari Taun 2019 – 2021 mengalami peningkatan yaitu tahun 2019 sebesar 158.260.000.000, tahun 2020 sebesar 176.807.169.329 dan tahun 2021 sebesar 278.269.682.501.



3. Realisasi kinerja yang mengacu pada target Jangka Menengah Renstra

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan / sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018 – 2023 seperti dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.3  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target  
Jangka Menengah Renstra 2018 – 2023

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	A	B	BB			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan DPMPPTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	A	B 79	B 81	B 83,49		
Meningkatkan Nilai Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Presentase Peningkatan Investasi (persen)				57%		
Meningkatnya Daya Tarik Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Nilai PMA/PMDN (Milyar)	1.050	158.260	176.807.169.329	278.269.682.501		

Sumber data : LHE SAKIP ITDA Kab. Bone Tahun 2021, SKM DPMPPTSP 2021, Rekapitulasi Investasi Penanaman Modal 2021

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah Tahun 2019 – 2021 adalah sebagai berikut :

#### **Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP**

Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan dengan realisasi Tahun 2019 adalah B dan Tahun 2020 adalah BB sementara realisasi kinerja tahun 2021 masih sementara proses penyusunan dokumen pendukung evaluasi.

#### **Indeks Kepuasan Masyarakat**

Realisasi Kinerja Tahun 2019 – 2021 jika dilihat predikat yang dicapai tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan yaitu predikat B akan tetapi jika dilihat dari skor realisasi kinerja mengalami peningkatan yaitu pada Tahun 2019 dengan skor 79, 2020 skor 81 dan 2021 skor 83,49.

#### **Presentase Peningkatan Investasi**

Realisasi Kinerja pada Tahun 2019 - 2020 masih kosong karena indikator ini merupakan indikator baru yang disajikan dalam dokumen Renstra Perubahan, sementara untuk Tahun 2021 Realisasi kinerja sebesar 57% dari target 15%.

#### **Nilai PMA/PMDN (Milyar)**

Realisasi Kinerja tahun 2019 – 2021 mengalami peningkatan yaitu tahun 2019 sebesar 158.260. 000.000, tahun 2020 sebesar 176.807.169.329 dan tahun 2021 sebesar 278.269.682.501.

Bedasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja tahun 2021 jika dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra tahun 2018 – 2023 untuk tujuan Meningkatkan Nilai Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone dengan indikator Presentase Peningkatan Investasi, sudah melebihi target capaian yaitu target RPJMD sebesar 54% dan capaian sebesar 57%, capaian ini diperoleh dari perhitungan presentase peningkatan nilai investasi penanaman modal dari tahun 2020 sebesar 176.807.169.329 yang mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 278.269.682.501.



4. Realisasi Kinerja dan Standard Pelayanan Minimal / Standard Nasional lainnya

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2021	Standar Nasional	
			Target 2021	Realisasi 2021

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone tidak termasuk dalam pengampu SPM maupun SPN.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis kita lihat tabel Ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.4  
Analisa Keberhasilan dan Kegagalan Indikator Kinerja

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Predikat				Rata - rata capaian
			>110	90=<s/d<110	60=<s/d<90	<60	
			Sangat berhasil	Berhasil	Cukup berhasil	Tidak berhasil	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	125%	√				166% (Sangat berhasil)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan DPMPTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	67%			√		
Meningkatkan Nilai Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Presentase Peningkatan Investasi (persen)	380%	√				
Meningkatnya Daya Tarik Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Nilai PMA/PMDN (Milyar)	93%		√			

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi capaian indikator tujuan / sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021 dalam kategori **Sangat Berhasil**.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut :

### Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP

Capaian Kinerja tahun 2021 masih sementara proses penyusunan dokumen pendukung evaluasi, oleh karena itu data yang kami sajikan dalam tabel tersebut diatas adalah data capaian kinerja tahun 2020 dengan capaian sebesar 125% dari target predikat B dan realisasi predikat BB.

Pencapaian kinerja tersebut diatas disebabkan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Bone melaksanakan kegiatan antara lain :

- Melaksanakan BIMTEK penyusunan LKjIP dan PK setiap Tahun sejak Tahun 2018;
- Menfasilitasi Tim Penyusun SAKIP OPD untuk melakukan asistensi Dokumen SAKIP ke Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten;
- Memberikan Award kepada Perangkat Daerah terkait capaian nilai SAKIP. Hasil evaluasi penilaian SAKIP oleh APIP dapat diakses pada QR Code berikut :



### Indeks Kepuasan Masyarakat

Tahun 2019 – 2021 jika dilihat predikat yang dicapai tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan yaitu predikat B akan tetapi jika dilihat dari skor realisasi kinerja mengalami peningkatan yaitu pada Tahun 2019 dengan

**skor 79**, 2020 **skor 81** dan 2021 **skor 83,49**. Laporan SKM DPMPSTSP Tahun 2021 dapat diakses pada QR Code berikut :



Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut pada indikator sasaran 1 disebabkan karena :

- Terbentuknya Inovasi Jemput antar perizinan dengan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 272 Tahun 2021 tentang pelayanan publik jemput antar Perijinan penelitian dan perijinan praktek tenaga medis di Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Timur dan Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone.
- Tersedianya layanan perizinan online antara lain :
  - a. Layanan aplikasi Sistem Informasi Perizinan secara elektronik (SIMPEL) memfasilitasi masyarakat dalam pengurusan perizinan yang dapat diakses melalui website [www.dpmptspbhone.co.id](http://www.dpmptspbhone.co.id) dan dapat didownload melalui aplikasi Play Store.
  - b. Sistem perizinan berusaha secara online (OSS) yang memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan surat izin.

### **Presentase Peningkatan Investasi**

Capaian Kinerja pada Tahun 2019 - 2020 masih kosong karena indikator ini merupakan indikator baru yang disajikan dalam dokumen Renstra Perubahan Tahun 2021 - 2023, sementara untuk Tahun 2021 Realisasi kinerja sebesar 57% dari target 15%.

Keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran 1.1 disebabkan karena :

- Adanya kebijakan pemerintah melalui sistem perizinan berusaha secara online yang ditujukan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha serta mempermudah pelaku usaha, baik perorangan maupun non perorangan untuk mempermudah pendaftaran/pengurusan perizinan kegiatan usaha.
- Adanya dukungan DAK non fisik untuk pelaksanaan kegiatan Bimbingan Tekhnis dan Sosialisasi Pengaplikasian Sistem Perizinan Berusaha



secara online (OSS) dan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

- Terbitnya Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal yang dapat diakses pada QR Code berikut :



#### **Nilai PMA/PMDN (Milyar)**

Capaian Kinerja tahun 2019 – 2021 mengalami peningkatan yaitu tahun 2019 sebesar 158.260. 000.000, tahun 2020 sebesar 176.807.169.329 dan tahun 2021 sebesar 278.269.682.501

Keberhasilan pencapaian kinerja Nilai PMA/PMDN disebabkan karena :

- Adanya kebijakan pemerintah melalui sistem perizinan berusaha secara online yang ditujukan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha serta mempermudah pelaku usaha, baik perorangan maupun non perorangan untuk mempermudah pendaftaran/pengurusan perizinan kegiatan usaha.
- Adanya dukungan Pemerintah pusat melalui alokasi DAK non fisik untuk pelaksanaan kegiatan Bimbingan Tekhnis dan Sosialisasi Pengaplikasian Sistem Perizinan Berusaha secara online (OSS) dan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- Terbitnya Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.
- Tertibnya pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal yang didukung dengan pengalokasian anggaran DAK melalui pelaksanaan kegiatan seperti yang dapat diakses pada QR Code berikut :



## 6. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Sumber Daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2021 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :



**Tabel 3.5**  
**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
A		B	C	D	E (D/C X 100%)	F	G	H (G/F X 100%)	I (E-H)
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	B	BB	125%	6.249.944.023	6.164.262.146	99%	26%
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan DPMPPTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	A	B	67%	6.249.944.023	6.164.262.146	99%	-32%
Meningkatkan Nilai Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone		Presentase Peningkatan Investasi (persen)	15	57	380%	466.334.500	333.333.300	71%	309%
	Meningkatnya Daya Tarik Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Nilai PMA/PMDN (Milyar)	300.000.000.000	278.269.682.501	93%	466.334.500	333.333.300	71%	21%
Jumlah					540%	6.716.278.523	6.497.595.446	97%	81%

Sumber data : LHE SAKIP ITDA Kab. Bone Tahun 2021, SKM DPMPPTSP 2021, Rekapitulasi Investasi Penanaman Modal 2021

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu :

#### **Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP**

Dengan Capaian Kinerja sebesar 125% dan capaian anggaran sebesar 99% menunjukkan efisiensi sumber daya sebesar 26%

#### **Indeks Kepuasan Masyarakat**

Dengan capaian Kinerja sebesar 67 % dan capaian anggaran sebesar 99% menunjukkan efisiensi sumber daya sebesar -32%

#### **Presentase Peningkatan Investasi**

Dengan capaian kinerja sebesar 380% dan capaian anggaran sebesar 71 % menunjukkan efisiensi sumber daya sebesar 309%

#### **Nilai PMA/PMDN (Milyar)**

Dengan capaian kinerja sebesar 93% dan capaian anggaran sebesar 71% menunjukkan efisiensi sumber daya sebesar 21%

Dari capaian tersebut indikator yang sangat berpengaruh dalam efisiensi penggunaan anggaran adalah indikator sasaran presentase peningkatan Investasi, pencapaian ini diperoleh dari presentase peningkatan nilai investasi dari tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 176.807.169.329 (*Seratus Tujuh Puluh Enam Milyar Delapan ratus Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*) dan capaian Tahun 2021 sebesar Rp. 278.269.682.501 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Satu Rupiah*), dengan realisasi kinerja sebesar 57% dan Realisasi Anggaran Sebesar 71%.



7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

**Tabel 3.6**

**Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Tujuan	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	BB	B	125%	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan DPMPPTSP		Indeks Kepuasan Masyarakat	A	B	67%	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Capaian Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100	100	100%	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu (persen)	100	100	100%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun dan ditetapkan (dokumen)	3	3	100%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat waktu (persen)	100	100	100%	



		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran Gaji dan tunjangan bagi ASN (laporan)	14	14	100%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Realisasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah	100	100	100%	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah laporan pengadaan pakaian dinas (laporan)	1	1	100%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti (laporan)	1	1	100%	
		Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah laporan kegiatan sosialisasi Peraturan perundang undangan yang dilaksanakan (laporan)	1	1	100%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor (persen)	100	100	100%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor (laporan)	12	12	100%	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (laporan)	4	4	100%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah laporan penyediaan Bahan Logistik Kantor (laporan)	12	12	100%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (laporan)	12	12	100%	





		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah laporan pembayaran Media Bahan Bacaan	12	12	100%	
			Jumlah Laporan pembayaran Media yang Menayangkan Iklan	12	12	100%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas (laporan)	165	82	50%	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah laporan pemeliharaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (laporan)	1	1	100%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (persen)	25	25	100%	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Laporan Pengadaan Mebeleur (laporan)	1	1	100%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (laporan)	1	1	100%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon/WiFi dan TV Kabel (rekening)	24	24	100%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	3	3	100%	



		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (persen)	100	100	100%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan (laporan)	12	12	100%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (laporan)	12	12	100%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya (laporan)	1	1	100%	
		<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>Presentase Ketepatan waktu penerbitan izin sesuai SOP (persen)</b>	80	85	106%	
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	7500	4944	66%	
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah laporan Izin yang telah dikaji, diteliti dan ditinjau (laporan)	1700	1259	74%	



			Jumlah Dokumen Standar Pelayanan yang disusun (dokumen)	1	1	100%	
			Jumlah laporan izin terbit yang diarsipkan (laporan)	7500	4944	66%	
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah dokumen hasil Monev penyelegaraan perizinan (dokumen)	1	1	100%	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Perizinan (dokumen)	1	1	100%	
			Jumlah Dokumen hasil Survey Kepuasan Masyarakat (dokumen)	1	1	100%	
		Penyediaan Pelayanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Laporan Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	4	4	100%	
<b>Meningkatkan Nilai Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone</b>			Presentase Peningkatan Investasi (persen)	15%	57%	380%	
	Meningkatnya Daya Tarik Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone		Nilai PMA/PMDN (Milyar)	300.000.000.000	278.269.682.501	93%	



		<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	Presentase Capaian Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal (persen)	<b>15</b>	<b>57</b>	380%	
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Investor yang mendapatkan pemberian fasilitas/Insentif yang menjadi kewenangan (persen)	<b>100</b>	<b>100</b>	100%	
		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen PERDA/Regulasi Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah (dokumen)	1	1	100%	
			Jumlah Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemberian Fasilitas / Insentif Penanaman Modal (dokumen)	1	1	100%	
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Presentase wilayah Kabupaten Bone yang telah disusun kedalam peta potensi investasi (persen)	<b>100</b>	<b>100</b>	100%	
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan Evaluasi Pelaksanaan RUPM (dokumen)	1	1	100%	
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Peluang Investasi (dokumen)	1	1	100%	



		<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	Presentase Peningkatan Jumlah Investor Penanaman Modal (persen)	<b>10</b>	<b>117</b>	1170%	
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Investor Penanaman Modal (investor)	<b>100</b>	<b>243</b>	243%	
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Laporan Seminar Bisnis, Forum, one on one meeting (laporan)	1	1	100%	
			Jumlah Kegiatan Penerimaan Misi Penanaman Modal			#DIV/0!	
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Kegiatan Pameran yang diikuti (laporan)	4	1	25%	
		<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>Presentase Perusahaan yang taat terhadap ketentuan penanaman modal (persen)</b>	<b>35</b>	<b>10</b>	29%	
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (persen)	<b>65</b>	<b>10</b>	15%	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan Perusahaan yang dipantau (laporan)	50	50	100%	



		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan kegiatan pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal (laporan)	25	22	88%	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Perusahaan yang diawasi (laporan)	10	10	100%	
		<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	Presentase ketersediaan Data dan Informasi Perizinsn dan Non Perizinan (persen)	<b>80</b>	<b>70</b>	88%	
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Lembaga lainnya yang terintegrasi dengan sistem informasi perizinan berusaha	1	1	100%	
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Sistem Informasi Perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik yang dikelola/dikembangkan/diban gun	1	1	100%	

**Sumber Data : Evaluasi Renja DPMPTSP Tahun 2021**

Berdasarkan tabel diatas tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut :



**Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP.**

Dengan target B telah berhasil tercapai BB dengan capaian sebesar 125%.

Indikator ini dapat terlaksana melalui program :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Program ini terdiri dari

- b. Program Pelayanan Penanaman Modal

**Indeks Kepuasan Masyarakat.**

Dengan target A, capaian B atau sebesar 67%. Indikator ini dapat terlaksana melalui program :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

- b. Program Pelayanan Penanaman Modal

**Presentase Peningkatan Investasi.**

Dengan target 15% dan realisasi 57% capaian 380%. Indikator ini terlaksana melalui program :

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- b. Program Promosi Penanaman Modal

- c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- d. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

**Nilai PMA/PMDN (Milyar).**

Dengan target Rp. 300.000.000.000 dan realisasi Rp. 278.269.682.501.

indikator ini dapat terlaksana melalui program :

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- b. Program Promosi Penanaman Modal

- c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- d. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

**Hambatan dalam pencapaian target kinerja**

**Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP.**

- a. Kurangnya pemahaman aparat dalam pelaksanaan Dokumen Pendukung SAKIP.

**Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.**

- a. Masih kurangnya inovasi terkait pelayanan perizinan dan non perizinan.

- b. Kurangnya pemahaman petugas pelayanan khususnya pada area *Front Office* dalam hal memberikan pelayanan yang baik.

- c. Aplikasi perizinan yang dapat memudahkan masyarakat masih kurang.

**Presentase Peningkatan Investasi.**

- a. Pelaksanaan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal belum maksimal
- b. Kegiatan promosi penanaman modal melalui media online belum maksimal.

**Nilai PMA/PMDN.**

- a. Sosialisasi Peraturan Bupati tentang pemberian insentif/kemudahan penanaman modal belum menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Bone
- b. Aplikasi peta potensi penanaman modal Kabupaten Bone belum tersedia

**Upaya Perbaikan**

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2021 dengan melalui 7 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya, yaitu :

**Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP**

- a. Penyempurnaan Dokumen Pendukung SAKIP
- b. Pembinaan ASN terkait pemahaman Dokumen evaluasi SAKIP

**Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat**

- a. Peningkatan inovasi pelayanan
- b. Pembinaan Aparat Pelayanan *Front Office* dalam memberikan layanan kepada masyarakat
- c. Peningkatan aplikasi perizinan yang dapat memudahkan masyarakat

**Presentase Peningkatan Investasi**

- a. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal
- b. Melaksanakan promosi penanaman modal melalui media online

**Nilai PMA/PMDN**

- a. Mensosialisasikan Peraturan Bupati tentang pemberian insentif/kemudahan penanaman modal
- b. Menyiapkan aplikasi peta potensi penanaman modal Kabupaten Bone



B. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Tahun 2021 setelah perubahan sebesar Rp. 6.716.278.523 (*Enam Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*) sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7  
Realisasi Anggaran Tahun 2021

Uraian	Jumlah		%
	Anggaran	Realisasi	
Tujuan 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 6.249.944.023	Rp 6.164.262.146	99%
Sasaran 1.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan DPMPPTSP	Rp 6.249.944.023	Rp 6.164.262.146	99%
Program :			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 5.556.283.823	Rp 5.503.685.446	99%
Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 693.660.200	Rp 660.576.700	95%
Tujuan 2 : Meningkatkan Nilai Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Rp 466.334.500	Rp 333.333.300	71%
Sasaran 2.1 : Meningkatnya Daya Tarik Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Rp 466.334.500	Rp 333.333.300	71%
Program :			
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 35.240.000	Rp 35.240.000	100%
Program Promosi Penanaman Modal	Rp 169.662.000	Rp 164.170.800	97%
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 259.337.500	Rp 131.827.500	51%
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 2.095.000	Rp 2.095.000	100%
<b>Total</b>	<b>Rp 6.716.278.523</b>	<b>Rp 6.497.595.446</b>	<b>97%</b>

Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone pada tahun 2021 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Kabupaten Bone T.A. 2021. Nilai pagu anggaran tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

## BAB IV PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran penilaian dan juga sebagai bentuk keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2021, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2021 adalah sangat baik, karena terdapat 2 indikator memenuhi kriteria sangat tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III dengan capaian 180% atau dikategorikan SANGAT BERHASIL hal ini menggambarkan bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2021, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ke depan, dalam hal ini keterampilan aparatur dalam mengoperasikan komputer/ laptop masih sangat minim sehingga dianggap menghambat pelayanan perizinan khususnya layanan perizinan online, sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan dan penanaman modal masih belum cukup untuk memberikan pelayanan sesuai SOP.



Bagi instansi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.